

Article History: Received: 25 April 2025, Revision: 20 May 2025, Accepted: 30 June 2025,
Available Online: 10 July 2025.

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v9i3.4473>

Pengaruh Barang dan Jasa, *Fiscal Stress*, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran: Analisis Panel Data di Provinsi Kalimantan Timur

Mirna Hanum¹, Sri Winarsih Ramadana^{2*}

^{1,2*} Politeknik Kutaraja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

Corresponding Email: wirna.taryono@gmail.com ^{2*}

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah barang dan jasa, fiscal stress dan sisa lebih pembiayaan beraspektrum terhadap penyerapan anggaran. Periode pengamatan dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2019 samapi tahun 2023. Entitas dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di provinsi kalimantan timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laopran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dicatat oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) periode 2019-2023. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, sementara itu fiscal stress dan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran. Secara simultan, belanja barang dan jasa, fiscal stress, dan sisa lebih pembiayaan anggaran beraspektrum signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil menunjukkan nilai probabilitas (F-statistic) $0.000000 < 0.05$.

Kata kunci: Penyerapan Anggaran; Belanja Barang Dan Jasa; Fiscal Stress; Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Abstract. This research was conducted to determine whether goods and services expenditure, fiscal stress, and remaining financing surplus have an impact on budget absorption. The observation period for this study spans from 2019 to 2023. The entities involved in this research are all districts/cities in the province of East Kalimantan. This study utilizes secondary data obtained from the reports of the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) recorded by the Directorate General of Financial Balance (DJPK) for the period of 2019-2023. The data analysis method used in this research is panel data regression analysis. The results of this study indicate that goods and services expenditure has a positive and significant effect on budget absorption, while fiscal stress and remaining financing surplus do not have a significant effect on budget absorption. Simultaneously, goods and services expenditure, fiscal stress, and remaining financing surplus significantly affect budget absorption. The results show a probability value (F-statistic) of $0.000000 < 0.05$.

Keywords: Budget Absorption; Goods and Services Expenditure; Fiscal Stress; Remaining Financing Surplus.

Pendahuluan

Pelaksanaan anggaran menjadi perhatian utama pemerintah daerah di Indonesia, khususnya dalam memenuhi target waktu yang telah ditetapkan. Optimalisasi penyerapan anggaran sangat penting untuk memastikan pemanfaatan dana publik secara efektif dalam mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam implementasinya, pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan yang memengaruhi kemampuan mereka dalam merealisasikan anggaran secara maksimal (Pattiasina *et al.*, 2022). Perubahan dari era Orde Baru ke masa Reformasi membuka peluang besar bagi penguatan pemerintahan daerah, terutama melalui pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Pengelolaan anggaran dan penerimaan keuangan, baik dari sisi administrasi maupun penggunaan, diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah menyusun rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh DPRD, sebagai cerminan kapasitas dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rohma Dyna *et al.*, 2023). Setiap tahun, pengelolaan keuangan daerah diatur melalui peraturan daerah dalam bentuk APBD. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, seluruh pendapatan dan belanja daerah wajib dicatat serta dikelola dalam APBD.

Penyerapan anggaran merefleksikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan yang dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Rahmawati & Ishak, 2020). Dalam praktik pemerintahan, tingkat penyerapan anggaran dijadikan indikator pencapaian tujuan instansi pemerintah (Rini Safitri & Annisa, 2023). World Bank mencatat bahwa banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan serupa dalam penyerapan anggaran, yang dikenal dengan istilah ‘slow back-loaded’. Fenomena ini menggambarkan kecenderungan rendahnya penyerapan anggaran pada awal hingga pertengahan tahun anggaran, kemudian meningkat tajam menjelang akhir tahun. Pola tersebut dapat menghambat pelaksanaan

proyek yang telah direncanakan dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi (Sara Bintu, 2019). Keterlambatan penyerapan anggaran sering terjadi dalam praktik pemerintahan. Umumnya, penyerapan anggaran tinggi menjelang akhir tahun dan rendah pada awal tahun, sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Penyerapan anggaran memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu meningkatkan dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Ketika target penyerapan anggaran tidak tercapai, terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan dalam alokasi dana (BPKP 2022). Rendahnya penyerapan anggaran pada pemerintah daerah menunjukkan lemahnya kinerja birokrasi. Optimalisasi penyerapan anggaran diperlukan untuk menciptakan efek ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Tingkat penyerapan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belanja barang dan jasa, tekanan fiskal, serta sisa lebih pembiayaan anggaran. Berdasarkan data, perkembangan belanja barang dan jasa, tekanan fiskal, serta SiLPA pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2019–2023 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pengelolaan Anggaran, Belanja Barang Jasa, Fiscal Stress, dan SiLPA di kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Tahun	SA	BBJ	FS	SiLPA
2019	100.61	92.03	119.96	28.72
2020	87.78	87.28	99.53	29.25
2021	102.66	106.99	123.43	29.19
2022	111.31	107.96	110.96	28.97
2023	166.07	242.53	171.48	29.90

Pengelolaan anggaran daerah merupakan aspek krusial dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Data mengenai belanja barang dan jasa, tekanan fiskal, serta SiLPA pada pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur selama periode 2019 hingga 2023 memperlihatkan dinamika yang signifikan dalam tata kelola anggaran. Berdasarkan tabel 1, pada tahun 2019 realisasi penggunaan anggaran tercatat cukup baik. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan pada penyerapan anggaran, belanja barang dan jasa, serta tekanan fiskal. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya kendala dalam pemanfaatan anggaran, yang

kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Penurunan realisasi pendapatan dan belanja berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Rendahnya realisasi pendapatan diduga berkaitan dengan ketidakstabilan ekonomi dan menurunnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Akibatnya, terjadi keterlambatan penyerapan anggaran yang berpotensi menghambat pelaksanaan program pemerintah dan mengancam pencapaian tujuan pembangunan daerah (Bank Indonesia, 2020). Pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan pada penyerapan anggaran, belanja barang dan jasa, serta tekanan fiskal secara bersamaan. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, dengan penyerapan anggaran dan belanja barang dan jasa mengalami kenaikan yang cukup berarti, meskipun tekanan fiskal sedikit menurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan fiskal dan pengelolaan keuangan mulai menunjukkan stabilitas.

Memasuki tahun 2023, penyerapan anggaran dan belanja barang dan jasa meningkat tajam, diikuti oleh tekanan fiskal yang juga mengalami kenaikan, diduga akibat proyek infrastruktur dan peningkatan aktivitas konstruksi. Sementara itu, sisa lebih pembiayaan anggaran relatif stabil sepanjang periode, meskipun pada beberapa waktu mengalami kenaikan. Nilai SiLPA yang tinggi menandakan adanya hambatan dalam pemanfaatan anggaran secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi pada penyerapan anggaran dan belanja barang dan jasa, sisa lebih pembiayaan tetap ada dan pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja barang dan jasa, tekanan fiskal, serta SiLPA terhadap penyerapan anggaran. Temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Sitepu *et al.* (2024) menemukan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah di Provinsi Riau. Tekanan fiskal juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian terdahulu di Amerika Serikat (Halim, 2001). Selain itu, SiLPA juga dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran

(Sitaresmi & Wahyudi, 2022). Interaksi antara belanja barang dan jasa, tekanan fiskal, serta SiLPA sangat memengaruhi efektivitas penyerapan anggaran di Kalimantan Timur, sekaligus mencerminkan tantangan dan peluang dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh belanja barang dan jasa, tekanan fiskal, serta sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di Provinsi Kalimantan Timur.

Tinjauan Literatur

Penyerapan Anggaran

Suhufi & Mustaqim (2023) mendefinisikan penyerapan anggaran sebagai kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja. Dana yang telah dialokasikan digunakan untuk membiayai kegiatan atau proyek yang telah direncanakan, mencakup belanja barang, jasa, dan kegiatan lain yang bertujuan mencapai sasaran pembangunan serta pelayanan publik. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi mencerminkan efektivitas pemerintah atau lembaga dalam mengelola dan memanfaatkan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, tingkat penyerapan yang rendah dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan anggaran, sehingga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pelayanan publik maupun pembangunan daerah.

Belanja Barang dan Jasa

Mengacu pada Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (1), pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah untuk memperoleh barang/jasa yang didanai oleh APBN/APBD. Proses ini meliputi seluruh tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pemilihan penyedia, tender, hingga penyerahan hasil pekerjaan (Priatmoko *et al.*, 2024). Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa menjadi bagian penting dari pengelolaan keuangan publik yang harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pelaksanaan pengadaan yang baik diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta

mendukung kelancaran program-program pemerintah.

Tekanan Fiskal

Wulandari & Fauzihardani (2022) menyatakan bahwa tekanan fiskal merupakan kondisi ketidakseimbangan antara kebutuhan pelayanan yang diharapkan masyarakat dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan tersebut, berdasarkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks keuangan daerah, tekanan fiskal menggambarkan keterbatasan anggaran yang dialami pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran, yang dapat dipicu oleh penurunan pendapatan, peningkatan kebutuhan belanja, atau ketidakpastian ekonomi. Kondisi ini kerap menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan, seperti pembayaran gaji, penyediaan layanan publik, serta pelaksanaan proyek pembangunan. Analisis surplus atau defisit dalam laporan keuangan daerah menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat tekanan fiskal; surplus menunjukkan pendapatan melebihi belanja, sementara defisit menunjukkan sebaliknya. Defisit yang terus-menerus dapat menandakan permasalahan serius dalam pengelolaan anggaran, yang berpotensi menyebabkan penundaan proyek, pengurangan layanan publik, atau peningkatan utang. Tekanan fiskal juga berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan serta melaksanakan program pembangunan yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat. Pemahaman yang memadai mengenai tekanan fiskal sangat diperlukan oleh pengambil kebijakan agar dapat merumuskan strategi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, menjaga keberlanjutan fiskal, dan meningkatkan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SiLPA menggambarkan perbedaan antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran. Dengan kata lain, SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan (pendapatan daerah) dan

pengeluaran (belanja daerah) selama satu periode anggaran sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (BPK, n.d.). SiLPA dapat mencerminkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, di mana dana yang tidak terpakai menunjukkan adanya pengelolaan yang baik. Namun, apabila jumlah SiLPA terlalu besar, hal tersebut dapat mengindikasikan rendahnya tingkat penyerapan anggaran, sehingga alokasi anggaran tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai SiLPA yang signifikan dapat digunakan untuk membiayai program pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran

Rini Safitri *et al.* (2023) menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan atau ketiadaan pengadaan barang dan jasa tidak memberikan dampak terhadap pencairan anggaran yang telah direncanakan. Dengan demikian, kualitas pengadaan barang dan jasa, baik baik maupun kurang baik, tidak memengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Rahmawati & Ishak (2020) yang menyatakan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Menurut mereka, belanja barang dan jasa berdampak signifikan terhadap penyerapan anggaran karena pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dari realisasi belanja daerah. Pelaksanaan pengadaan yang tepat waktu, efisien, dan sesuai prosedur dapat mempercepat penggunaan anggaran serta membantu pencapaian target kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Tekanan Fiskal terhadap Penyerapan Anggaran

Daerah yang belum sepenuhnya siap menghadapi era otonomi sering kali menghadapi tekanan fiskal akibat tuntutan peningkatan kemandirian fiskal. Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya kebutuhan pendapatan untuk membiayai berbagai jenis pengeluaran. Setiap daerah perlu mengoptimalkan penyerapan anggaran guna memenuhi kebutuhan tersebut. Secara teoritis,

peningkatan tekanan fiskal dapat memengaruhi penyerapan anggaran. Penelitian Methasa *et al.* (2023) di Kabupaten/Kota Aceh menunjukkan bahwa tekanan fiskal berpengaruh terhadap penyerapan anggaran; semakin besar tekanan fiskal yang dihadapi, semakin rendah tingkat penyerapan anggarannya. Namun, hasil berbeda diperoleh oleh Mita *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa tekanan fiskal tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh waktu penetapan anggaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola tekanan fiskal melalui perencanaan serta pengelolaan keuangan yang baik, sehingga tekanan fiskal tidak selalu menjadi hambatan langsung dalam realisasi anggaran.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

SiLPA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.05/2013 yang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Komponen utama yang memengaruhi SiLPA meliputi realisasi pendapatan, laporan realisasi anggaran, serta pengeluaran dan penerimaan pembiayaan. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa sisa pembiayaan anggaran merupakan selisih antara realisasi pendapatan dan belanja, atau antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD pada satu periode anggaran. SiLPA juga berfungsi sebagai indikator efisiensi pengeluaran pemerintah. Semakin tinggi nilai SiLPA, semakin menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran kurang optimal dan perencanaan kurang efisien, yang dapat menyebabkan penundaan belanja serta anggaran yang tidak terserap. Penelitian Methasa *et al.* (2023) menemukan bahwa sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, mencerminkan dana sisa yang belum terserap tahun sebelumnya. Namun, Aprilia *et al.* (2024) menemukan bahwa SiLPA tidak selalu berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, karena dana tersebut merupakan sisa dari tahun sebelumnya yang belum digunakan dan lebih berfungsi sebagai cadangan. Oleh karena itu, dana tersebut tidak langsung digunakan dalam

pelaksanaan anggaran tahun berjalan dan tidak secara otomatis meningkatkan penyerapan anggaran.

Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data yang dianalisis berbentuk angka dengan metode analisis regresi data panel. Metode data panel merupakan kombinasi antara data time series dan data cross section, sehingga mampu memberikan informasi yang lebih kaya serta meningkatkan validitas hasil penelitian (Santi *et al.*, 2022). Periode analisis yang digunakan mencakup tahun 2019 hingga 2023 pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan periode waktu tersebut diharapkan dapat menangkap dinamika perubahan kebijakan yang berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta berdampak pada besaran pengeluaran pemerintah daerah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Sampel yang digunakan merupakan data laporan keuangan dari 10 kabupaten/kota tersebut selama lima tahun berturut-turut, yaitu periode 2019–2023, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 data laporan keuangan.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen (Dependent Variable)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk menjalankan program serta kegiatan yang mendukung pembangunan daerah (Rahmawati & Ishak, 2020). Berdasarkan definisi tersebut, penyerapan anggaran dalam penelitian ini diukur dengan rumus:

$$\text{Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah belanja barang jasa, tekanan fiskal, dan sisa lebih pembiayaan. Pengadaan barang jasa mengacu pada pengadaan barang jasa yang didanai oleh APBN/APBD, yang mencakup seluruh proses mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyerahan hasil pekerjaan. Proses pengadaan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan, di mana pemerintah menentukan barang atau jasa yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelaksanaan pengadaan itu sendiri (Priatmoko *et al.*, 2024). Maka dalam penelitian ini belanja barang jasa diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Barang Jasa}}{\text{Anggaran Belanja Barang Jasa}} \times 100\% \quad (\text{rasio})$$

Selanjutnya tekanan fiscal, dimana situasi ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan yang disediakan oleh pemerintah dengan sumber daya yang ada. Dalam pengelolaan keuangan daerah tekanan fiscal merujuk pada keadaan dimana pemerintah daerah kebutuhan biaya belanja yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penurunan pendapatan daerah peningkatan kebutuhan belanja, atau ketidakpastian ekonomi (Wulandari & Fauzihardani, 2022). Maka dalam penelitian ini tekanan fiscal diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\% \quad (\text{rasio})$$

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan SiLPA sebagai selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu periode anggaran (BPK, n.d.). maka dalam penelitian ini SiLPA diukur dengan rumus:

$$\text{SiLPA} = \ln(\text{SiLPA}) \quad (\text{rasio})$$

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel.

Regressi data panel adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi waktu dan dimensi individu. dengan rumus sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Di mana:

Y_{it}	= penyerapan Anggaran
$\beta_1 X_{1it}$	= Belanja Barang dan Jasa
$\beta_2 X_{2it}$	= Tekanan fiscal
$\beta_3 X_{3it}$	= SiLPA
α	= Konstanta
β	= Koefisien regresi
e_{it}	= Error term
i	= Kab/Kota
t	= Tahun

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Uji Model Data Panel

Regressi data panel memiliki tiga jenis model, yaitu model *common effect*, model *fixed effect*, dan model *random effect*. Sebelum melakukan analisis regresi data panel, penting untuk melakukan uji untuk menentukan model mana yang paling tepat. Ada tiga langkah pengujian dalam analisis model data panel, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM) (Christine, 2021)

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan pilihan model antara model efek umum dan model efek tetap. Kriteria untuk Uji Chow menyatakan bahwa jika nilai probabilitas Chi-square < 0,050, maka model yang dipilih adalah efek tetap. Sebaliknya, jika nilai probabilitas Chi-square > 0,050, maka model yang dipilih adalah efek umum (Christine, 2021).

Tabel 2. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.150360	(9,37)	0.3542
Cross-section Chi-square	12.335866	9	0.1950

Dari hasil uji chow di atas nilai probabilitas *cross-section* adalah $0.3542 > 0.05$ dimana H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian model yang terpilih adalah model *common effect* (CEM).

Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih antara model *fixed effect* dan model *random effect* (REM). Kriteria uji Hausman adalah bahwa jika nilai probabilitas dari *cross section random* $< 0,050$, maka model yang dipilih adalah *fixed effect* (FEM). Sebaliknya, jika nilai probabilitas dari *cross section random* $> 0,050$, maka model yang dipilih adalah *random effect* (REM).

Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi- Sq. df	Prob.
Cross-section Rnandom	4.626558	3	0.2013

Hasil uji hausman menunjukkan nilai *probability cross-section random* sebesar $0.2013 > 0.05$ H_0 diterima dan H_1 ditolak maka model yang terpilih adalah *random effect* (REM).

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) merupakan sebuah uji untuk mengetahui apakah model *common effect* atau *random effect* untuk digunakan. Kriteria untuk uji *Lagrange Multiplier* (LM) adalah bahwa jika nilai *probabilitas Breusch-Pagan* $< 0,050$, maka model yang dipilih adalah *random effect* (REM). Sebaliknya, jika nilai *probabilitas Breusch-Pagan* $> 0,050$, maka model yang dipilih adalah *common effect* (CEM).

Tabel 4. Uji Lagrange Multipliner (LM)

Test Hypothesis			
	Cross-section	Time	Both
Breusch- Pagan	0.002172 (0.9628)	2.703180 (0.1001)	2.705352 (0.1000)

Berdasarkan hasil uji *Lagrange Multiplier* (LM), diperoleh nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,9628. Nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti model yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM). Selanjutnya, hasil Uji Chow menunjukkan bahwa *Common Effect Model* (CEM) lebih baik dibandingkan dengan *Fixed*

Effect Model (FEM). Sementara itu, hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa *Random Effect Model* (REM) lebih baik daripada *Fixed Effect Model* (FEM). Namun, berdasarkan Uji *Lagrange Multiplier* (LM), *Common Effect Model* (CEM) lebih unggul dibandingkan *Random Effect Model* (REM). Berdasarkan ketiga hasil pengujian tersebut, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model* (CEM).

Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dalam penelitian ini. Model regresi dikatakan baik jika tidak terdapat korelasi tinggi (tolerance) antara variabel-variabel independen (Methasa *et al.*, 2023). Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendekripsi multikolinearitas adalah nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Namun, nilai VIF merupakan metode yang paling umum digunakan. Kriteria penilaian VIF adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai VIF < 10 , maka tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel independen.
- 2) Jika nilai VIF > 10 , maka terdapat multikolinearitas di antara variabel independen.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.572027	587.8954	NA
X1	0.003503	81.33027	1.140092
X2	0.006924	168.1542	1.189742
X3	0.000823	595.7966	1.088032

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, seluruh nilai tolerance antar variabel independen menunjukkan angka < 10 . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat (multikolinearitas) antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari permasalahan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan

varians residual pada setiap pengamatan dalam model regresi. Jika varians residual pada setiap pengamatan tetap (konstan), maka kondisi tersebut disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varians residual berbeda-beda, maka terjadi heteroskedastisitas (Methasa *et al.*, 2023). Kriteria pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model.
- 2) Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka terdapat heteroskedastisitas.

Tidak ditemukannya heteroskedastisitas dalam model regresi menunjukkan bahwa model yang digunakan sudah baik dan memenuhi asumsi klasik.

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

F-statistic	1.396488	Prob. F (3,46)	0.2559
Obs*R-squared	4.173648	Prob. Chi-Square (3)	0.2433
Scaled explained SS	4.112162	Prob. Chi-Square (3)	0.2496

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,2433. Nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Model regresi ini telah memenuhi asumsi homoskedastisitas, yang berarti model regresi dapat dikatakan baik.

Tabel 7. Hasil Regresi Common Effect (CEM)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-72.42452	84.61596	-0.855920	0.3965
X1	0.343994	0.033644	10.22453	0.0000
X2	0.085900	0.044997	1.909029	0.0625
X3	4.813530	3.253636	1.479431	0.1458

Tabel 8. Statistik lain

Statistik	Nilai	Statistik Lain	Nilai
R-squared	0.757530	Mean dependent var	113.2352
Adjusted R-squared	0.741717	S.D. dependent var	48.99348
S.E. of regression	24.89925	Akaike info criterion	9.344171
Sum squared resid	28,518.74	Schwarz criterion	9.497133
Log likelihood	-229.6043	Hannan-Quinn criter.	9.402420
F-statistic	47.90477	Durbin-Watson stat	2.099345
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan tabel di atas, hasil regresi data panel yang digunakan adalah model efek umum (*common effect model*). Persamaan regresi yang diperoleh dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$SA = -72,42457 + 0,343994BBJ + 0,085900FS + 4,813530SiLPA + eit$$

Keterangan:

SA: Penyerapan Anggaran

BBJ: Pengeluaran untuk Barang dan Jasa

FS: Tekanan Fiskal

SiLPA: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

e_{it}: Error term

Interpretasi Koefisien:

- 1) Konstanta (C = -72,42457): Jika seluruh variabel independen (BBJ, FS, dan SiLPA)

bernilai nol, maka penyerapan anggaran diperkirakan sebesar -72,42457.

- 2) Koefisien BBJ (0,343994): Setiap kenaikan 1% pada pengeluaran barang dan jasa akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 0,343994 unit, dengan asumsi variabel lain tetap.
- 3) Koefisien FS (0,085900): Setiap kenaikan 1% pada tekanan fiskal akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 0,085900 unit, dengan asumsi variabel lain tetap.
- 4) Koefisien SiLPA (4,813530): Setiap kenaikan 1% pada surplus anggaran (SiLPA) akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 4,813530 unit, dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing koefisien variabel independen dalam model regresi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil regresi:

- 1) Pengeluaran Barang dan Jasa (BBJ) memiliki nilai probabilitas 0,0000 ($< 0,05$), sehingga berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.
- 2) Tekanan Fiskal (FS) memiliki nilai probabilitas 0,0625 ($> 0,05$), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) memiliki nilai probabilitas 0,1458 ($> 0,05$), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Tabel 9. Uji T

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-72.42452	84.61596	-0.855920	0.3965
X1	0.343994	0.033644	10.22453	0.0000
X2	0.085900	0.044997	1.909029	0.0625
X3	4.813530	3.253636	1.479431	0.1458

Hasil analisis menunjukkan bahwa:

- 1) Variabel X1 (Pengeluaran untuk Barang dan Jasa) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran untuk barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.
- 2) Variabel X2 (Tekanan Fiskal) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0625. Meskipun nilai ini mendekati 0,05, namun tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, tekanan fiskal tidak dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.
- 3) Variabel X3 (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1458 ($> 0,05$). Oleh karena itu, H0 tidak dapat ditolak, yang berarti sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian pada uji statistik F adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai probabilitas (F-statistic) $< 0,05$, maka seluruh variabel independen secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- 2) Jika nilai probabilitas (F-statistic) $> 0,05$, maka seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil regresi, nilai probabilitas (F-statistic) adalah 0,000000 ($< 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel pengeluaran untuk barang dan jasa, tekanan fiskal, dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Tabel 10. Uji F

Statistik	Nilai
F-statistic	47.90477
Prob(F-statistic)	0.000000
Durbin-Watson stat	2.099345

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0,000000 ($< 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen, yaitu belanja barang dan jasa, tekanan fiskal, dan sisa lebih pembiayaan anggaran, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu penyerapan anggaran.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Jika nilai Adjusted R-Square mendekati satu, maka model regresi yang digunakan dapat dikatakan sangat baik karena hampir seluruh perubahan pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen.

Tabel 11. Uji R^2

Statistik	Nilai
R-squared	0.757530
Adjusted R-squared	0.741717
Mean dependent var	113.2352
S.D. dependent var	48.99348

Berdasarkan pada hasil uji R^2 ditemukan bahwa *Adjusted R-squared* memiliki nilai sebesar 0,741717. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh belanja barang jasa, tekanan fiskal, dan sisa lebih pemberian anggaran sebesar 74%, sedangkan 26% variable lainnya yang tidak diikutsertakan pada penelitian ini berkontribusi terhadap sisa varian tersebut.

Pembahasan

Tujuan dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh signifikan antara belanja barang dan jasa, tekanan fiskal, dan sisa lebih pemberian anggaran (SiLPA) terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil uji hipotesis, belanja barang dan jasa (X1) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,0000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini bertentangan dengan temuan Rini Safitri & Annisa (2023) yang menyatakan bahwa belanja barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arini & Juniati (2023) serta Cris & Didiet (2023), yang menemukan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Semakin tinggi penyerapan belanja barang dan jasa, maka realisasi penyerapan anggaran juga semakin tinggi. Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur, penyerapan anggaran dipengaruhi oleh belanja barang dan jasa karena adanya peningkatan kualitas pengadaan, dukungan terhadap program strategis dan pembangunan infrastruktur besar, serta manajemen anggaran yang lebih baik. Faktor-faktor ini mendukung pencapaian pembangunan daerah dan realisasi anggaran yang optimal. Sementara itu, untuk variabel tekanan fiskal (X2), hasil uji menunjukkan bahwa tekanan fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0625. Meskipun nilainya mendekati batas signifikansi 0,05, hasil ini tetap dianggap tidak signifikan dan menunjukkan bahwa tingkat tekanan fiskal pada pemerintah daerah tidak berdampak langsung terhadap rendahnya penyerapan anggaran. Temuan ini bertolak belakang dengan penelitian Methasa *et al.* (2023) yang menyatakan tekanan fiskal berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Sementara itu, Mita *et al.* (2024) menyebutkan bahwa pemerintah provinsi di Pulau Sumatra tergolong rentan terhadap tekanan fiskal, namun tidak dapat dikatakan berpengaruh.

Hal serupa juga terjadi di Provinsi Kalimantan Timur yang tergolong dalam kategori rentan terhadap tekanan fiskal, meskipun belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Beberapa faktor yang menyebabkan tekanan fiskal tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Kalimantan Timur antara lain pengelolaan anggaran yang terencana dan efisien, pemulihian ekonomi, aktivitas infrastruktur yang stabil, serta fluktuasi tekanan fiskal yang masih terukur. Data menunjukkan bahwa meskipun tekanan fiskal mengalami fluktuasi, nilai SiLPA sepanjang periode penelitian relatif stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih mampu mengelola anggaran dengan baik meskipun menghadapi tekanan fiskal. Untuk variabel sisa lebih pemberian anggaran (SiLPA) (X3), diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,1458, yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Hashfi (2022) yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Lemahnya perencanaan APBD serta rendahnya penyerapan anggaran dapat menyebabkan SiLPA yang sudah direncanakan sejak awal tahun menjadi tidak terserap, sehingga berisiko menumpuk dari tahun ke tahun jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan target penyerapan yang proporsional sangat diperlukan agar penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun dan seluruh rencana pembangunan dapat terlaksana secara optimal. Namun, hasil temuan ini sejalan dengan Aprilia *et al.* (2024) yang menyatakan SiLPA tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Pendanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur lebih banyak bergantung pada dana transfer dan pendapatan asli daerah (PAD), oleh sebab itu SiLPA secara tidak langsung memengaruhi penyerapan anggaran di provinsi tersebut.

Berdasarkan hasil uji simultan, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000000, lebih kecil dari 0,05. Belanja barang dan jasa, tekanan fiskal, dan SiLPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019–2023. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,741717 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 74%, sedangkan sisanya sebesar 26% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, yang berarti semakin tinggi dan efektif pengeluaran untuk belanja barang dan jasa, maka penyerapan anggaran pemerintah daerah juga akan meningkat sehingga

berdampak positif terhadap pelaksanaan program dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara itu, tekanan fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran, meskipun terdapat indikasi adanya pengaruh yang lemah. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran. Namun demikian, secara simultan, ketiga variabel independen tersebut terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, meskipun pengaruh secara parsial tidak semuanya signifikan. Variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama mampu menjelaskan penyerapan anggaran sebesar 74%, sedangkan sisanya sebesar 26% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Meskipun penelitian ini telah merangkum pengaruh belanja barang dan jasa, tekanan fiskal, dan SiLPA terhadap penyerapan anggaran, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

Penelitian ini belum mencakup semua variabel tambahan yang dapat memengaruhi penyerapan anggaran, dan hasil analisis juga dapat dipengaruhi oleh keterbatasan data baik dari segi kualitas maupun cakupan waktu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan dinamis, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel tambahan seperti mekanisme pengadaan dan transparansi pengelolaan pengadaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya bagi pemerintah daerah di Kalimantan Timur untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan belanja barang dan jasa serta memperkuat perencanaan anggaran yang lebih responsif terhadap tekanan fiskal. Pengelolaan SiLPA yang lebih matang juga sangat penting untuk menghindari akumulasi pembiayaan yang berpotensi menghambat realisasi pembangunan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan dalam memperbaiki tata kelola anggaran, meningkatkan koordinasi antarunit terkait, serta mendukung penyerapan anggaran yang lebih efisien dan efektif demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Anggraini, M. D., Sari, K. R., & Armaini, R. (2024). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU SUMATERA. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 111-120.
- Aprilia, O., Nadirsyah, N., & Indriani, M. (2024). Pengaruh besaran anggaran dan sisa anggaran tahun sebelumnya terhadap serapan anggaran belanja dengan perubahan anggaran sebagai pemoderasi pada SKPK Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 9(2), 90-98.
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v9i2.27416>.
- Bitu, S. H. S. (2022). *Pengaruh Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna* (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).
- Dyna, D. R., Masnila, N., & Wahyudi, R. (2023). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Dan Belanja Tak Terduga Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(2), 676-697.
- Halim, A. (2001). Anggaran daerah dan “fiscal stress”(sebuah studi kasus pada Anggaran daerah provinsi di Indonesia). *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 16(4).
- Patiran, C. L. (2021). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Atribut Dewan Komisaris Terhadap Kebijakan Dividen Kas. *Parsimonian-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 35-47.
<https://doi.org/10.33479/parsimonian.v8i2.557>.
- Pattiasina, V., Noch, M. Y., Rumasukun, M. R., Hijrah, L., Ikbal, M., & Tamaela, E. Y. (2023). Challenges in the Implementation of Government Budgets: A Case Study of Indonesian Local Governance. *JABE (Journal of Accounting and Business Education)*, 8(1), 50-61.
- Priatmoko, M., Suartini, S., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). Kajian yuridis pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari pinjaman luar negeri. *Binamulia Hukum*, 13(1), 165–176.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.712>.
- Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor â€œFaktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180-189.
- Rini Safitri, & Annisa, A. (2023). Pengaruh perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 3(3), 374–386.
<https://doi.org/10.55606/jurima.v3i3.3087>.
- Santi, S. M., Elisabeth, S. S., Ira, S. M., Roma, M. S., Sitompul, & Putri, L. D. K. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih pembayaran anggaran (SiLPA), dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal di Provinsi Sumatra Selatan. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 5(1), 30.
<https://doi.org/10.29103/jeru.v5i1.7918>.
- Sitaresmi, S., & Wahyudi, H. (2022). Pengaruh SiLPA dan PAD terhadap serapan anggaran di Provinsi Lampung (The influence of SiLPA and PAD on budget absorption in Lampung Province). 2(1), 29–44.
- Sitepu, D. R., Priyatmo, T., & Akbar, R. (2024). Determinan penghambat penyerapan anggaran: Studi empiris pada Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 1–19.
<https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.509>.

Suhufi, R. I., & Mustaqim, F. (2023).
PENGARUH PERENCANAAN
ANGGARAN, POLITIK
ANGGARAN DAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG ATAU JASA,
TERHADAP PENYERAPAN
ANGGARAN (STUDI KASUS PADA
OPD SE-KOTA
BAUBAU). *ENTRIES*, 5(2), 169-188.

Wulandari, S., & Fauzihardani, E. (2022).
Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran, Fiscal Stress dan Pendapatan
Asli Daerah terhadap Penyerapan
Anggaran dengan Rebudgeting sebagai
Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi
Akuntansi*, 4(1), 93-110.